



PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, *WHISTLEBLOWING* PADA PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Ni Wayan Sintya Prabawati¹ Ni Ketut Rasmini²

Article history:

Submitted: 08 Mei 2023

Revised: 15 Juni 2023

Accepted: 23 Juni 2023

Keywords:

Accountability;

Competence;

Fraud;

Transparency;

Whistleblowing;

Kata Kunci:

Akuntabilitas;

Fraud;

Kompetensi;

Transparansi;

Whistleblowing

Koresponding:

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

sintyaprabawati3@gmail.com

Abstract

Fraud is a deviant act or unlawful act that is carried out intentionally to gain personal or group benefits that can harm other people or certain parties. This study aims to determine the effect of human resource competence, accountability, transparency, whistleblowing on fraud prevention in managing village funds. This research was conducted in 6 villages in the District of Rendang with a total sampling technique or census. Respondents in this study were 92 people. The data analysis used is multiple linear regression. The results of this study are human resource competence, accountability, transparency, whistleblowing have a positive effect on fraud prevention in managing village funds. The implication of this research is that the existence of human resource competence, accountability, transparency and supported by adequate whistleblowing will be able to improve fraud prevention in managing village funds.

Abstrak

Fraud merupakan perbuatan menyimpang atau tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi, whistleblowing pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di 6 desa yang ada di Kecamatan Rendang dengan teknik penentuan sampel sampling total atau sensus. responden pada penelitian ini sebanyak 92 orang. Data analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi, whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi serta didukung dengan whistleblowing yang memadai maka akan dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi perubahan dalam pengelolaan dana desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Kecamatan Rendang merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Karangasem yaitu sebanyak 6 desa. Dana desa yang dialokasikan ke desa-desa di Kecamatan Rendang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Desa di Kecamatan Rendang menjadi salah satu dari 5 kecamatan yang meraih alokasi dana desa tertinggi di Kabupaten Karangasem (Nusabali.com). Hal ini memicu kecurangan dana desa pada Kecamatan Rendang terjadi. Berdasarkan data yang didapat dari media online dalam kurun waktu 2015 – 2021 telah terjadi tiga kecurangan di Kecamatan Rendang. Salah satunya terjadinya kecurangan dana desa pada Kecamatan Rendang masih tetap terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kasus Korupsi alokasi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp1,9 miliar Pemerintahan Provinsi Bali untuk Desa Pakraman Rendang Tahun 2018, dengan tersangka oknum Ni Wayan Murtiani dan Ni Ketut Wartini yang ditangkap Polres Karangasem menetapkan Ni Ketut Wartini (40), warga Banjar Kuyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang lantaran menyalahgunakan Anggaran Dana Desa yang seharusnya untuk penambahan modal usaha dipakai untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Murniati memakai Dana sejumlah Rp292.637.000 dengan lokasi kejadian berada di Banjar Kuyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang. Serta terbukti pada kasus media online Antaranews Bali.

Hasil investigasi Polres Karangasem menunjukkan temuan data jika Mantan kepala Desa Adat Pakraman Segah I Wayan Kawiada melakukan tindakan pidana korupsi Dana bantuan sosial dari pemerintahan Karangasem dan pemerintahan Provinsi Bali senilai Rp 245 Juta pada bulan Oktober 2016. Dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan secara pribadi tanpa memepertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa Dana itu hasil pengajuan bantuan sosial kepada Kabupaten Karangasem dan Pemprov Bali (Radarbali.com). Menurut teori terbaru tentang *fraud* yaitu teori hexagon *fraud* terdapat 6 hal yang memicu terjadinya kecurangan yaitu stimulus (tekanan), kemampuan, peluang, rasionalisasi, ego (kesombongan) dan kolusi. *Fraud* (kecurangan) adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang lain atau pihak tertentu menurut Aini *et al.*, (2017). Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah usaha atau langkah yang ditempuh guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi & Sujana, 2019). Adapun beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi, dan *whistleblowing*. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharuskan guna menjalankan tugas-tugas dengan akuntabel serta transparan supaya tidak timbul tindak penyelewengan dana. Maka dari itu, pada

pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas (Laksmi & Sujana, 2019).

Aspek sumber daya manusia berkaitan dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki seorang individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan atau kualitas dan pengetahuan yang dimiliki seorang individu dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya pada berbagai situasi dan kondisi (Laksmi & Sujana, 2019). Pengelolaan keuangan yang baik dicerminkan dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan didukung dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi yang berkualitas, menyebabkan aparatur desa dapat menjalankan tugas dari pemerintah pusat sebagai suatu hubungan keagenan. Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017), Jayanti & Suardana (2019), serta penelitian Laksmi & Sujana (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sedangkan menurut Wijayanti (2017) diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

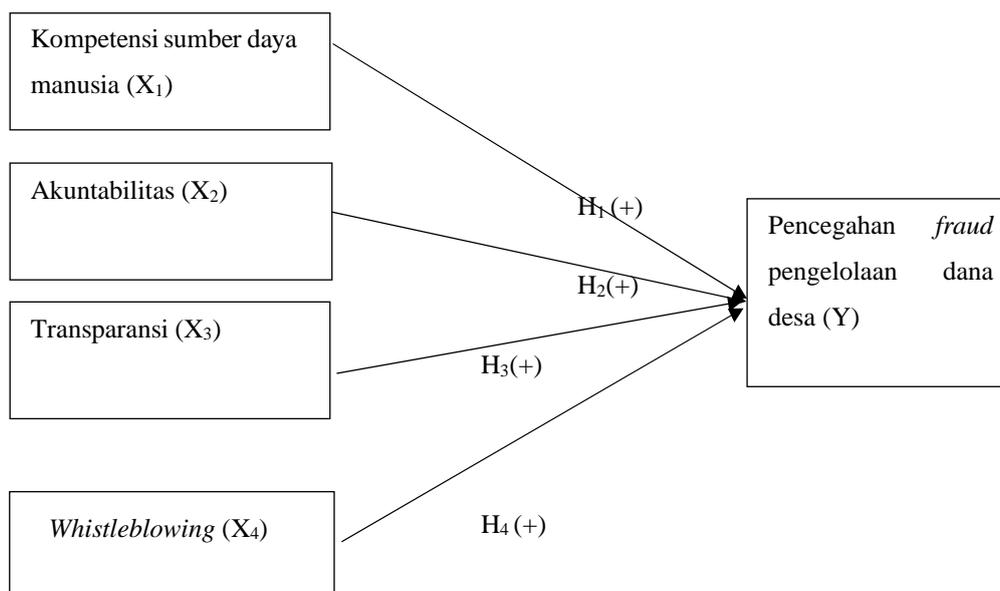
Akuntabilitas berhubungan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak-pihak yang berhubungan harus bisa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kewenangan yang dikasikan terhadap bidangnya. Aspek akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah, sampai pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (Rosjidi, 2001). Akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Azizah, 2018).

Transparansi dianggap suatu hal yang di perhatikan dalam pengelolaan dana desa. Aspek Transparansi adalah asas yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib dilaksanakan atau pada semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi tiap orang untuk memperoleh/mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu lembaga/perorangan, seperti keuangan, program, penerima manfaat, dan lain sebagainya (Azizah, 2018). Mencegah terjadinya kecurangan internal perlu disiapkan wadah atau tempat pengaduan kecurangan sehingga *whistleblowing* diperlukan dalam pengelolaan dana desa.

Whistleblowing system adalah wadah bagi seorang whistleblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. *Whistleblowing system* yang efektif akan dapat mendorong keikutsertaan masyarakat maupun karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan dengan melaporkannya kepihak yang dapat menanganinya (Hariawan, Sumadi dan Erlinawati, 2020) Menurut Wardana *et al.*, (2017) *whistleblowing* adalah penyampaian informasi atas perbuatan yang melawan hukum,

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, Whistleblowing pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Ni Wayati Sintya Prabawati dan Ni Ketut Rasmini

aturan, tata cara dan penyelewengan tanggungjawab yang dapat membahayakan rakyat (Suandewi, 2021). Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa? Apakah akuntabilitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa? Apakah transparansi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa? Apakah *whistleblowing* berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa? Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:



Hipotesis:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

H₃: Transparansi berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

H₄: *Whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan pada seluruh kantor desa yang ada di kecamatan rendang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di kecamatan rendang. Berdasarkan hal tersebut, maka disebarkan kuesioner untuk perangkat desa yang menjalankan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun.

Proses pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik sampling total atau *sensus* yang dimana sampel yang digunakan adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa (dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban) yaitu terdiri dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kaur keuangan dan kaur perencanaan di Desa Dinas di Kecamatan Rendang.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah sampel yang didapat yaitu sebanyak 92 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara *door to door* atau secara langsung dengan mendatangi satupersatu kantor desa dan mengumpulkan Kembali kuesioner tersebut.

Tabel 1.
Nama desa yang ada di kecamatan rendang

No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Nongan	RENDANG	KARANGASEM
2	Rendang	RENDANG	KARANGASEM
3	Besakih	RENDANG	KARANGASEM
4	Pempatan	RENDANG	KARANGASEM
5	Menanga	RENDANG	KARANGASEM
6	Pempatan	RENDANG	KARANGASEM

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua ataulebih variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu persamaan linier (Ghozali, 2016:170).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

Y	= Pencegahan <i>Fraud</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi Variabel X_1, X_2, X_3, X_4
X_1	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
X_2	= Akuntabilitas
X_3	= Transparansi
X_4	= <i>Whistleblowing</i>
ε	= Standar Error

Analisis univariat dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif terhadap data Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, *Whistleblowing* dan Pencegahan *Fraud*. Adapun hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Minimum	Maksimum	Mean	SD	Variance
Kompetensi Sumber Daya Manusia	92	18	24	19,92	1,917	3,675
Akuntabilitas	92	14	20	17,87	1,940	3,763
Transparansi	92	14	20	17,47	1,918	3,680
<i>Whistleblowing</i>	92	15	28	20,10	2,468	6,089
Pencegahan <i>Fraud</i>	92	15	23	18,98	2,472	6,109

Sumber: Data primer diolah, 2023

Bahwa jumlah responden (N) sebanyak 92 orang dengan penjelasan masing – masing variabel sebagai berikut. Nilai rata – rata Kompetensi sumber daya manusia (X_1)

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Trasnparansi, Whistleblowing pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Ni Wayati Sintya Prabawati dan Ni Ketut Rasmini

sebesar 19,92 atau mendekati nilai minimum yaitu sebesar 24,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dan setuju atas enam pernyataan kuesioner terkait kompetensi sumber daya manusia dengan total jawaban responden terendah yaitu 18,00. Nilai standar deviasi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,917 yang lebih kecil dari nilai rata – rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel kompetensi sumber daya manusia sangat kecil dengan varians sebesar 3,675. Nilai rata – rata Akuntabilitas (X_2) sebesar 17,87 atau mendekati nilai minimum yaitu sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dan setuju atas lima pernyataan kuesioner terkait akuntabilitas dengan total jawaban responden terendah yaitu 14,00. Nilai standar deviasi variabel akuntabilitas sebesar 1,940 yang lebih kecil dari nilai rata – rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel akuntabilitas sangat kecil dengan varians sebesar 3,763. Nilai rata – rata Transparansi (X_3) sebesar 17,47 atau mendekati nilai minimum yaitu sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dan setuju atas lima pernyataan kuesioner terkait transparansi dengan total jawaban responden terendah yaitu 14,00. Nilai standar deviasi variabel akuntabilitas sebesar 1,918 yang lebih kecil dari nilai rata – rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel akuntabilitas sangat kecil dengan varians sebesar 3,680. Nilai rata – rata *whistleblowing* (X_4) sebesar 20,10 atau mendekati nilai minimum yaitu sebesar 28,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dan setuju atas tujuh pernyataan kuesioner terkait *whistleblowing* dengan total jawaban responden terendah yaitu 15,00. Nilai standar deviasi variabel *whistleblowing* sebesar 2,468 yang lebih kecil dari nilai rata – rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel *whistleblowing* sangat kecil dengan varians sebesar 6,089. Nilai rata – rata Pencegahan *fraud* (Y) sebesar 18,98 atau mendekati nilai minimum yaitu sebesar 23,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dan setuju atas tujuh pernyataan kuesioner terkait pencegahan *fraud* dengan total jawaban responden terendah yaitu 15,00. Nilai standar deviasi variabel pencegahan *fraud* sebesar 2,472 yang lebih kecil dari nilai rata – rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel pencegahan *fraud* sangat kecil dengan varians sebesar 6,109.

Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf nyata 5%. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis 0,05, maka dapat dikatakan bahwa residual model regresi tersebut berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Uji Normalitas

	<i>UnstandadizedResidual</i>
N	92
<i>Kolmogorov-Smirnov Test Z</i>	0,066
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data primer diolah, 2023

Uji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,200 nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa residual model regresi tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen, jika nilai VIF dibawah 10, atau nilai *tolerance* untuk semua variabel independen lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan data tidak mengalami gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinearitas dari variabel independen dengan bantuan SPSS adalah seperti berikut.

Tabel 4.
Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,722	1,386
Akuntabilitas (X_2)	0,542	1,846
Transparansi (X_3)	0,499	2,004
Whistleblowing (X_4)	0,835	1,198

Sumber: Data primer diolah, 2023

Bahwa nilai VIF untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) adalah sebesar 1,386, variabel Akuntabilitas (X_2) sebesar 1,846, variabel Transparansi (X_3) adalah sebesar 2,004, dan variabel Whistleblowing (X_4) adalah sebesar 1,198. Maka dapat dikatakan bahwa nilai VIF untuk semua variabel independen kurang dari 10. Diketahui pula nilai *tolerance* untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) sebesar 0,722, variabel Akuntabilitas (X_2) sebesar 0,542, variabel Transparansi (X_3) adalah sebesar 0,499, dan variabel Whistleblowing (X_4) adalah sebesar 0,835 akibatnya dapat diterima bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen lebih dari 0,10. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan uji *Glejser* dalam taraf nyata 5%. Jika nilai signifikansi untuk semua variabel independen lebih dari nilai kritis 0,05 maka data dikatakan bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Nilai Kritis	Nilai Signifikansi
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	0,05	0,089
Akuntabilitas (X_2)	0,05	0,391
Transparansi (X_3)	0,05	0,766
Whistleblowing (X_4)	0,05	0,452

Sumber: Data primer diolah, 2023

Bahwa nilai signifikansi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) adalah sebesar 0,089, dan variabel Akuntabilitas (X_2) adalah sebesar 0,391, variabel Transparansi (X_3) adalah sebesar 0,766, dan variabel *Whistleblowing* (X_4) adalah sebesar 0,452. Karena nilai signifikansi semua variabel independen tersebut lebih dari nilai kritis 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara signifikan semua variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokadestetisitas.

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui model hubungan antara variabel terikat dengan variabel independennya. Adapun model regresi berganda yang dihasilkan dengan bantuan SPSS adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = -6,639 + 0,473X_1 + 0,304X_2 + 0,425X_3 + 0,166X_4$$

Keterangan:

- Y : Pencegahan *Fraud* (Y)
 X_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)
 X_2 : Akuntabilitas (X_2)
 X_3 : Transparansi (X_3)
 X_4 : *Whistleblowing* (X_4)

Dari model regresi diatas dapat dijelaskan beberapa hal yaitu,

Nilai konstanta sebesar $-6,639$ menunjukkan bahwa apabila nilai semua variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Akuntabilitas (X_2), Transparansi (X_3), dan *Whistleblowing* (X_4) sebesar nol, maka nilai Pencegahan *Fraud* (Y) sebesar $-6,639$. Nilai koefisien Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) sebesar 0,473 menunjukkan pengaruh yang positif dan searah antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y), yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan skor variabel X_1 , maka nilai Y akan cenderung meningkat. Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap konstan. Nilai koefisien Akuntabilitas (X_2) sebesar 0,304 menunjukkan pengaruh positif dan searah antara variabel Akuntabilitas (X_2) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y), yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan skor variabel X_2 , maka nilai Y akan cenderung meningkat. Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap konstan. Nilai koefisien Transparansi (X_3) sebesar 0,425 menunjukkan pengaruh positif dan searah antara variabel Transparansi (X_3) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y), yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan skor variabel X_3 , maka nilai Y akan cenderung meningkat. Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap konstan. Nilai koefisien *Whistleblowing* (X_4) sebesar 0,166 menunjukkan pengaruh positif dan searah antara variabel *Whistleblowing* (X_4) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y), yang artinya bahwa setiap penambahan satu satuan skor variabel X_4 , maka nilai Y akan cenderung meningkat Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap konstan. Selain ketiga hal diatas dapat dilihat dari nilai koefisien variabel independen mana yang lebih mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen, dan dari model regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) lebih mempengaruhi Pencegahan *Fraud* (Y) dibandingkan dengan variabel lainnya. Karena semakin nilai koefisien X_1 menjauhi 0 maka variabel tersebut akan semakin berpengaruh.

Koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel terikat.

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,837 ^a	0,701	0,687	1,383

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang didapatkan sebesar 0,701 (hubungan kuat). Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, dan *Whistleblowing* mampu menjelaskan keragaman variabel terikat yaitu Pencegahan *Fraud* sebesar 70,1%. Sedangkan sebesar 29,9% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor diluar penelitian ini.

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi linier berganda sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan uji F dalam taraf nyata 5%.

Tabel 7.
Hasil Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	389.546	4	97,387	50,914	0,000 ^b
	Residual	166.410	87	1,913		
	Total	555.957	91			

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari nilai kritis 0,05 sehingga dapat diterima bahwa ketiga variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Akuntabilitas (X_2), Transparansi (X_3), dan *Whistleblowing* (X_4) tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* (Y). Atau dapat dikatakan bahwa model regresi yang diperoleh layak digunakan. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi t kurang dari atau sama dengan 0,05 (Ghozali, 2016:171). Adapun hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.
Hasil Uji t

Variabel Independen	Nilai t	Nilai Kritis (α)	Nilai Signifikansi (P-value)
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)	5,309	0,05	0,000
Akuntabilitas (X_2)	2,998	0,05	0,004
Transparansi (X_3)	3,973	0,05	0,000
Whistleblowing (X_4)	2,581	0,05	0,012

Sumber: data primer diolah, 2023

Hasil uji hipotesis yang menunjukkan signifikansi dari masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Hipotesis satu (H_1) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai koefisien regresi 0,437 dengan nilai signifikansi $0,0000 < \alpha$ (0,05) yang berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H_1) diterima. Artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan desa maka semakin kecil kemungkinan tindakan kecurangan yang terjadi. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia maka semakin besar terjadinya tindakan kecurangan. Pernyataan $X_{1.4}$ yaitu “Saya mementingkan tugas dinas/kantor daripada kepentingan pribadi/ keluarga jika dihadapkan pada waktu yang sama” merupakan pernyataan dengan rata – rata skor tertinggi. Hal itu menunjukkan aparat pemerintahan desa bertanggungjawab pada amanah yang diberikan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan *agency theory*. Dalam *agency theory* menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara principal dan agent, dimana principal menunjuk agent untuk melaksanakan suatu jasa dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini pemerintah Desa (*agent*) mendapatkan amanah dari Pemerintah Pusat maupun Daerah (*principal*) untuk menjalankan urusan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah memerlukan aparat desa yang kompeten dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai tujuan dari pemerintah pusat sehingga kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir. Rata-rata skor jawaban terendah ditunjukkan pada pernyataan $X_{1.1}$ yaitu “Pengalaman, tingkat pendidikan, dan latar belakang yang saya miliki sangat mempengaruhi pekerjaan maupun tugas dimana saya ditempatkan”. Hal ini menunjukkan aparat desa yang bertanggungjawab lebih mempengaruhi pekerjaan mereka dibandingkan pengalaman, tingkat pendidikan dan latar belakang dalam hal ini untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Di dalam suatu instansi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap dan prilaku yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung *theory fraud hexagon*, yaitu elemen peluang atau kesempatan (*opportunity*), dimana jika terdapat peluang dalam suatu instansi maka hal tersebut memberi kesempatan bagi aparat desa untuk melakukan kecurangan, maka diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan berkualitas untuk meminimalisir adanya kecurangan. Di dalam

suatu instansi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Laksmi & Sujana (2019), Dewi & Rasmini (2019), Jayanti & Suardana (2019) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hipotesis dua (H₂) menyatakan akuntabilitas berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi 0,304 dengan nilai signifikansi $0,0000 < \alpha (0,05)$ yang berarti bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima. Artinya semakin tinggi akuntabilitas maka semakin kecil Tindakan kecurangan yang akan terjadi. Sebaliknya, semakin rendah akuntabilitas maka semakin besar terjadinya tindak kecurangan. Hal ini berarti bahwa penting bagi semua pemerintahan desa untuk mengetahui pentingnya memahami dan menerapkan konsep akuntabilitas karena pencegahan *fraud* dapat dimulai dari minimnya akuntabilitas. Pernyataan X_{2.2} yaitu “Bapak/Ibu menyediakan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa.” merupakan pernyataan dengan rata – rata skor tertinggi. Akuntabilitas merupakan sebuah operasional mulai dari perencanaan, proses dan pertanggungjawaban yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang – undang dan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan bahwa pertanggungjawaban agen (manajer) hanya berorientasi pada prinsipal (pemilik) semata, semestinya akuntabilitas ditujukan kepada pihak yang berkepentingan (*interest group*) terhadap apa yang dipercayakan kepada agen. Namun melihat fenomena yang terjadi kebanyakan pelaku tindakan kecurangan dilakukan oleh orang-orang internal dalam sebuah organisasi yang memegang sebuah tanggung jawab. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi potensi-potensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Berdasarkan *fraud hexagon theory* faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh motivasi yaitu *need* (kebutuhan). Dimana setiap orang punya kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang akan melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi walau dengan melakukan kecurangan sekalipun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Saputra *et al.* (2019), Adhivinna & Agustin (2021), Sari *et al.* (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hipotesis ketiga (H₃) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai koefisien regresi 0,425 dengan nilai signifikansi $0,0000 < \alpha (0,05)$ yang berarti bahwa hipotesis tiga (H₃) di terima. Artinya semakin tinggi transparansi maka semakin rendah tindakan kecurangan yang terjadi. Sebaliknya, semakin rendah transparansi maka semakin tinggi terjadinya kecurangan. Transparansi merupakan asas yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Pernyataan X_{3.3} yaitu “transparansi yang positif dapat mencegah terjadinya kecurangan.” merupakan pernyataan dengan rata – rata skor tertinggi. Hal ini menunjukkan dengan adanya transparansi yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan sesuai dengan *theory agency* yaitu keadaan dimana *principal* memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya transparansi

yang tinggi *principal* dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapanya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari. Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan *theory fraud hexagon* yaitu peluang, yang dimana karena tidak adanya keterbukaan atau transparansi menimbulkan peluang atau kesempatan kepada para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yaitu Wardhani & Purnamasari (2021), Yuliasuti *et al.* (2019), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki nilai koefisien regresi 0,166 dengan nilai signifikansi $0,0000 < \alpha < 0,05$ yang bahwa hipotesis empat (H_4) diterima. Artinya semakin tinggi *whistleblowing* maka semakin rendah Tindakan kecurangan yang terjadi. Sebaliknya semakin rendah *whistleblowing* maka semakin tinggi. Tindakan kecurangan yang akan terjadi. Pernyataan $X_{4.2}$ yaitu “Saya bersedia menyatakan komitmen untuk berpartisipasi aktif melaporkan adanya pelanggaran dan kecurangan” merupakan pernyataan dengan rata – rata skor tertinggi. Hal ini menunjukkan apabila aparat desa berkomitmen untuk mencegah kecurangan melalui *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan perilaku yang direncanakan oleh *whistleblower*. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior*, dimana mendukung *whistleblowing*, terbukti menjadi kerangka kerja yang baik untuk memprediksi maksud *whistleblowing* dan dapat mengukur persepsi sikap orang lain tentang *whistleblowing*. Kontrol perilaku merupakan faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mendorong *whistleblowing*. *Theory of planned behavior*, ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang akan memperhitungkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang akan mereka lakukan. Hal ini sejalan dengan *theory fraud hexagon* yaitu rasionalisasi dimana para pelaku memikirkan perbuatannya wajar selama telah melakukan pekerjaan dengan baik. Penerapan *Whistleblowing System* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan. *Whistleblowing* disini merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yaitu Widyawati *et al.* (2019), Hariawan *et al.* (2020), Islamiyah *et al.* (2020) yang menyatakan *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini ada sebagai berikut. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang kompeten memahami tugas pokok, memahami perencanaan dan penganggaran keuangan desa serta mampu menyusun laporan keuangan desa, mematuhi norma sosial dan aturan-aturan yang berlaku dan menolak segala bentuk tindakan suap dan kecurangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi, Whistleblowing pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Ni Wayati Sintya Prabawati dan Ni Ketut Rasmini

Akuntabilitas berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti pertanggungjawaban penerima amanah dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban seseorang atas kewajibannya dalam memegang suatu amanah mampu menghindarkan terjadinya suatu kecurangan.

Transparansi berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti transparan dalam pengelolaan dana desa mampu mencegah terjadinya *fraud*. Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti dengan adanya *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa mampu mencegah terjadinya *fraud*. Tempat pengaduan yang memadai dan mampu melindungi *whistleblower* mampu memberikan keberanian pada *whistleblower* untuk mengadukan Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuisisioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuisisioner sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang akurat. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh beberapa faktor terhadap kecurangan sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh faktor lain yang belum dikaji terhadap kepuasan pasien.

Berdasarkan simpulan diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan, sebagai berikut. Pemerintah desa diharapkan dapat menambah pemahaman dengan melakukan sosialisasi mengenai *whistleblowing system* agar dapat mendeteksi lebih dini terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, karena keberanian sikap individu akan mempercepat pengungkapan kecurangan. Selain itu, perlunya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa karena sumber daya manusia yang tidak kompeten serta melanggar aturan dan norma yang berlaku. Perlunya akuntabilitas untuk meningkatkan tanggungjawab yang telah diberikan kepada perangkat desa. serta transparansi diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat serta meminimalisir terjadinya *fraud*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rendang dengan jumlah 92 responden yang terdiri dari badan pengawas desa, kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan dan kepala dusun yang diambil dari tiap-tiap desa. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah jumlah responden serta melakukan penelitian di kabupaten-kabupaten yang lain sehingga mampu menggambarkan pengaruh dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang berpengaruh yang tidak diteliti oleh peneliti seperti moralitas atau menambahkan variabel moderasi karena pada penelitian ini nilai koefisien determinasi hanya 70,1% pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan dan 29,9% sisanya belum diuji dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kelurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 25–35.
- Agustiawan, A., Ririn Melati, & Siti Rodiah. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos. *Accounting and Management Journal*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378>
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi ISSN:*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869>
- Ayu, L., Dewi, M., Ayu, & I. G., Damayanthi, E. (2019). Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia PENDAHULUAN Adanya perubahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 26, 2375–2395.
- Azizah, W. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Bhae, M. A., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2022). *the Effect of Presentation of Village Financial Reports, Control Environment and Individual Morality on Fraud Prevention in Village Fund Management (Case Study in Tanaduen Village, Watuliwung Village, Habi Village and Langir Village, Kangae District, Sikk.* 72(6), 761–771.
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Owner*, 6(4), 4021–4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Bustaman, B., Amalia, E., & Jalaluddin, J. (2018). A Performance Analysis of Village Fund Management: A Case Study in Lut Tawar District – Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 1(2), 112–121. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v1i2.1167>
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan *Locus Of Control* Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p12>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralita Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Des. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455–468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Febriarty, A., Heni, W. M. T., & Romangsi, I. N. (2022). *The Influences of Accountability, Transparency and Internal Control with Participation as Moderation Variable on Fraud Prevention in Village Funds Management.* *Jurna; Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 5(1), 61–80.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Spss 25 (EDISI 9)*.
- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). *Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia.* *Management Science Letters*, 11, 2033–2044. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–618. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). *The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds.* *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). *Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Village Funds Management.* 35(4), 51–63. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2022). Fraud Prevention of Village Fund Management. *International Journal of Islamic Business and Management Review*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v2i1.136>
-

- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Jayanti, L.S.I.D dan Suardana, K. . (2019). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>
- Kosec, K., & Wantchekon, L. (2020). *Can information improve rural governance and service delivery? World Development*, 125, 104376. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.07.017>
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan: sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian kompensasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Limba, F. B., Sapulatte, S. G., & Usmany, A. E. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 35–47. <https://doi.org/10.32520/jak.v9i2.1310>
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 184–198.
- Mahdi, S. A. R., Djaelani, Y., Suwito, & Buamonabot, I. (2021). *Determinants of fraud prevention with spiritual intelligence as moderator*. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6004>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 8, 622–633.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi *The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis Di*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B.N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2019). *Whistleblowing and Tri Hita Karana to Prevent Village Fund Fraud in Bali*. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.10.03>
- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2021). *Financial Management Information System, Human Resource Competency and Financial Statement Accountability: A Case Study in Indonesia*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 277–285. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0277>
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Shakil, R. M., Mollah, M. A., Rahman, S. T., & Habib, M. M. (2020). *A bibliometric review of global research on human resources management and supply chain management*. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(4), 173–184.

-
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, moralitas dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) pengelolaan dana desa (Studi empiris pada desa se- Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Padjadjaran. Sumedang*.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan). *Jurnal Akuntansi*, 18(2), 109– 124.
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wardhani, F. K., & Purnamasari, D. I. (2021). The impact of accountability, tranparency, and morality of village apparatus on fraud prevention in the management of allocated village funds. *Journal of Business and Information System*, 3(2), 137–144.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>
- Yulian Maulida, W., & Indah Bayunitri, B. (2021). *The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Yuliastuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 502–518. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.3>